

ANALISIS DANA TRANSFER PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Oleh:
Veronika Mamuka¹
Inggriani Elim²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹veromamuka.vm@gmail.com
²e_inggriani@yahoo.com

ABSTRAK

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dana transfer Pemerintah Pusat terhadap belanja modal, peranan belanja modal terhadap PAD, dan peranan PAD terhadap dana transfer. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif yaitu mengungkapkan fenomena masalah, hasil penelitian menunjukkan dana transfer sangat berperan terhadap belanja modal karena jika jumlah transfer dari Pemerintah Pusat dikurangi akan menyebabkan penurunan belanja modal. Dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kab. Kepulauan Talaud untuk menunjang pengelolaan daerah, karena masih minimnya Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci : dana transfer, pemerintah pusat, pemerintah daerah.

ABSTRACT

Transfer funds or fund balance is a source of revenue comes from the state budget to support the implementation of the authority of local governments to achieve the purpose of giving autonomy to the regions, particularly the increase in services and public welfare are getting better. Fund balance includes the Special Allocation Fund is used to finance government projects, the General Allocation Fund which is used to fund salaries, and revenue-sharing Tax/Non-tax is used to overcome the problem of vertical imbalance (between the center and area). Department of Revenue of Regional Finance and Asset Management which is the object of this study. This study aims to determine the role of central government transfers funds to the capital expenditure, the role of capital expenditures to revenue, and the role of PAD to transfer funds. The method of analysis used descriptive quantitative phenomenon that reveals problems, the results showed the transfer of funds was instrumental to capital expenditure because if the number of transfers from the central government reduced will cause a decrease in capital expenditures. Fund transfers from the central government is still very much needed by the government to support the management of Kab. Kepulauan Talaud area, because they still lack local revenue.

Keywords : transfer funds, central government, local government.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, telah membawa perubahan dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah.

Dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peran penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut.

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud masih sangat diharapkan oleh pemerintah daerah karena masih kurangnya PAD yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Peranan dana transfer sangat besar dalam aktifitas keuangan yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Transfer dana desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peran penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dana transfer Pemerintah Pusat terhadap belanja modal di Kabupaten Talaud, peranan belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Talaud, dan peranan PAD berpengaruh terhadap dana transfer.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Horngren dan Harrison (2007:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Warren (2008:10) menyatakan akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu meliputi kreditor, pemasok, investor, karyawan, pemilik, dan lain-lain. Akuntansi menurut Susanto (2008:4) adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis.

Definisi akuntansi sebagai seni dikemukakan oleh *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA), yaitu akuntansi sebagai suatu seni meskipun diakui adanya beberapa aspek dalam akuntansi sebagai bidang ilmu (science). Menurut definisi AICPA tersebut, letak seni pada akuntansi terdapat pada kata "*creative skill and ability*". Maksudnya adalah dalam melaksanakan tugasnya akuntan sering menggunakan pengetahuan, kemampuan dan pengalamannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang tujuan akhirnya adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam suatu entitas atau organisasi.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu cabang dari bidang akuntansi yang sudah cukup lama dikenal di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Bastian (2007:25) mengemukakan akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Nordiawan, dkk (2008:1) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan* menyatakan bahwa: akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi pemerintahan juga adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara, khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah sebagai organisasi yang memegang peran utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip atau standar akuntansi dan pelaporan harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan tempat prinsip itu digunakan, selain juga dari sisi pemakaian laporan keuangan. Government Finance Officers Association dalam buku *Governmental Accounting Auditing and Financial Reporting* mengemukakan bahwa untuk dapat memahami model akuntansi pemerintah dengan tepat, diperlukan pertimbangan tiga hal sebagai berikut:

- a. Struktur Pemerintahan
- b. Sifat dari Sumber Daya
- c. Proses Politik memegang peran penting

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan secara umum melayani dua tujuan yang luas yaitu akuntabilitas dan informasi untuk manajemen. Namun demikian tidak terdapat model atau desain tunggal untuk suatu sistem akuntansinya dan untuk laporan keuangan pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti persyaratan dan pembatasan oleh peraturan dan hukum, nilai budaya dan tradisi serta faktor-faktor lainnya. Karakteristik lainnya dari akuntansi pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Karena ingin mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak diperlukan.
2. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak diperlukan.
3. Karena sistem akuntansi suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya bergantung pada sistem pemerintahannya.
4. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Muhammad (2012:12), menyatakan akuntansi pemerintahan secara umum mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai media akuntabilitas dan menyediakan informasi manajemen. *American Accounting Association*, menyatakan tujuan akuntansi untuk setiap bentuk organisasi adalah untuk menyediakan informasi bagi:

1. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk pengidentifikasian terhadap berbagai keputusan penting dan penentuan sasaran serta tujuan organisasi.
2. Pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif.

3. Pengurusan dan pelaporan penyimpanan berbagai sumber daya.
4. Pemberian kontribusi agar dapat tercapai efektivitas organisasi, baik untuk organisasi yang berorientasi laba maupun yang tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan serta permintaan seluruh masyarakat untuk tujuan pengendalian sosial fungsi-fungsi mereka.

Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan juga beranekaragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Apalagi, UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Otonomi daerah yang sedang dan terus bergulir sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa yang oleh pemerintah pusat telah di tampung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (pembaharuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999). Aspek pemerintahan reformasi pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah yang sedang dan terus bergulir sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa yang oleh pemerintah pusat telah di tampung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (pembaharuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu rencana pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. APBD merupakan gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan memberikan pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah. Fungsi APBD adalah:

1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi
3. Fungsi Stabilitas

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sistem desentralisasi, daerah berhak merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya. Dengan demikian PAD menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Sebab, di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intinya, PAD harus ditetapkan secara proporsional sebagai salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Berikut ini beberapa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4. Lain-lain PAD yang sah

Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal merupakan bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun (Halim 2008:4). Sebagai bentuk investasi sektor publik, belanja modal lebih fokus pada kebijakan pemerintahan dengan dimensi waktu yang bervariasi. Belanja modal merupakan bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun (Halim 2008:4). Sebagai bentuk investasi sektor publik, belanja modal lebih fokus pada kebijakan pemerintahan dengan dimensi waktu yang bervariasi.

Dana Transfer

Dana transfer merupakan inti dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2005.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil ini merupakan bagian dari desentralisasi fiskal, yaitu berupa pemberian sebagian persentase (%) pendapatan Nasional dari suatu sumber tertentu kepada daerah dimana pendapatan itu diperoleh. Dana Bagi Hasil bisa berupa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non-Pajak. Dengan kata lain, sumber Bagi Hasil merupakan bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dalam DAU disesuaikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dengan kata lain, DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini diperuntukkan guna membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Singkatnya, Dana Alokasi Khusus merupakan transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan Nasional.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Aspek terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai atau cukup untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Keuangan pemerintah daerah inilah yang kemudian menentukan ampu atau tidaknya daerah melaksanakan tugas dan fungsinya. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dan perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk memudahkan pembangunan di tiap daerah guna mencapai tujuan negara. Transfer dana dari APBN yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah dalam proses transfer.

Penelitian Terdahulu

Pandegirot (2011) dalam penelitian terdahulu tentang Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hasil penelitian ini menunjukkan DAU Prov. SULUT berubah-ubah tiap tahunnya, DBHP lebih kecil dibandingkan DAU. Suaidah (2011) dalam penelitian terdahulu tentang Efektifitas Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam Belanja Daerah Kab/Kota Bangkalan, hasil penelitian pengalokasian pendapatan daerah yang meliputi PAD dan DAU dalam Belanja Daerah sudah cukup efisien karena bagian keuangan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten kepulauan Talaud di Kecamatan Melonguane. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan yaitu pada bulan Desember 2013.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Langkah-langkah yang dilalui atau dikerjakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Mendefinisikan dan merumuskan masalah
- b) Melakukan studi kepustakaan
- c) Mengumpulkan data
- d) Mengolah dan menyajikan informasi
- e) Menganalisis data
- f) Menyusun laporan

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan
Metode pengumpulan data dengan cara observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke objek yang diteliti.
2. Penelitian Kepustakaan
Dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian untuk digunakan landasan teori untuk membantu membahas masalah penelitian.

Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dimana peneliti memperoleh data yang ada, kemudian merumuskan dan menafsirkan data tersebut sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum Objek Penelitian**

Terbentuknya Kabupaten Talaud merupakan klimaks dari suatu rangkaian panjang proses perjuangan selama setengah abad dari putra-putri terbaik Porodisa Talaud. Paradise adalah nama yang indah yang telah tertanam dalam nilai-nilai kehidupan pada setiap pribadi atau individu yang luhur sebagai insan manusia yang menyakini akan sang Maha Kuasa sebagai pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, maka Ia adalah Tuhan yang menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan manusia yang berkenan kepadaNya, telah diwarisi secara turun temurun dalam struktur masyarakat adat yang religius, mengikat tali persaudaraan dengan cinta kasih terhadap sesamanya juga terpeliharanya alam lingkungan yang baik untuk mereka hidup.

Tonggak sejarah peradaban warga Paradise telah dinyatakan Kabupaten Kepulauan Talaud resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 2002, dengan seorang pejabat negara Drs. F. Tumimbang, sebagai pejabat bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), tepatnya berada di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang beralamat Jl. Buibatu Melonguane (Kompleks Perkantoran PEMDA). Rencana strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2010-2014 dengan mengacu pada RPJMD daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 Tahun 2010 disusun sebagai dasar dan tolak ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Visi DPPKAD adalah *"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib Tahun 2010-2014"*. Dengan mengacu pada Visi tersebut maka Misi DPPKAD adalah:

1. Menyediakan laporan keuangan dan laporan aset serta meningkatkan tata kelola keuangan dan tata kelola aset daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib aturan didukung dengan profesionalisme dan kinerja yang tinggi.
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas.

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian, maka data yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1. Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan Pusat ke Daerah Untuk Tahun 2011

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1.	Pendapatan Transfer	387.587.786.061,49	389.676.588.315,00	100,54
2.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	340.787.900.227,00	341.267.24.421,00	100,14
3.	Dana Bagi Hasil Pajak	16.706.713.464,00	16.997.994.784,00	101,74
4.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	157.092.763,00	345.155.637,00	219,71
5.	Dana Alokasi Umum	278.637.894.000,00	278.637.894.000,00	100,00
6.	Dana Alokasi Khusus	45.286.200.000,00	45.286.200.000,00	100,00

Tabel 2. Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan Pusat ke Daerah Untuk Tahun 2011

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1.	Pendapatan Transfer	452.211.367.421,00	454.873.162.148,00	100,59
2.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	422.124.482.610,00	423.605.303.639,00	100,35
3.	Dana Bagi Hasil Pajak	18.376.150.789,00	19.191.481.925,00	104,44
4.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	258.257.821,00	923.747.714,00	357,68
5.	Dana Alokasi Umum	349.375.894.000,00	349.375.894.000,00	100,00
6.	Dana Alokasi Khusus	54.114.180.000,00	54.114.180.000,00	100,00

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 anggaran pendapatan transfer sebesar Rp 387.587.786.061,49 dan realisasinya sebesar Rp 389.676.588.315,00 dengan perolehan persentase 100,54%, sedangkan pada tahun 2012 anggaran pendapatan transfer sebesar Rp 452.211.367.421,00 dan realisasinya sebesar Rp 454.873.162.148,00 dengan perolehan persentase 100,59. Ini dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 ke tahun 2012 perolehan anggaran mengalami kenaikan begitu juga dengan realisasinya yang lebih besar dari anggaran. Untuk dana perimbangan, tahun 2011 anggarannya sebesar Rp 340.787.900.227,00 dengan realisasi sebesar Rp 341.267.24.421,00 dan persentase sebesar 100,14%, sedangkan untuk tahun 2012 anggaran dana perimbangan sebesar Rp 422.124.482.610,00 dan realisasi sebesar Rp 423.605.303.639,00 dan perolehan persentase sebesar 100,35%. Ini juga dapat dilihat kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan begitu juga dengan realisasinya yang lebih besar dari anggaran.

Dengan dana bagi hasil pajak, anggaran tahun 2011 sebesar Rp 16.706.713.464,00, realisasi sebesar Rp 16.997.994.784,00 dan peroleh persentase 101,74%, pada tahun 2012 anggarannya sebesar Rp 18.376.150.789,00, realisasinya sebesar Rp 19.191.481.925,00 dengan persentase sebesar 104,44%. Dapat dilihat juga kenaikan dari tahun ke tahun dengan realisasinya juga tetap bertambah dan melebihi anggaran yang disediakan. Begitu pula dengan dana bagi hasil bukan pajak, tahun 2011 anggarannya sebesar Rp 157.092.763,00 realisasinya sebesar Rp 345.155.637,00 dengan persentase 219,71%, tahun 2012 anggaran dana bagi hasil bukan pajak adalah Rp 258.257.821,00 dengan realisasi sebesar Rp 923.747.714,00 maka persentase yang diperoleh sebesar 357,68%. Disini dapat dilihat bahwa anggaran yang disediakan tidak mencukupi sehingga realisasinya lebih besar dibandingkan anggarannya. Adapun dengan dana alokasi umum tahun 2011, anggaran dan realisasinya seimbang yaitu sebesar Rp 278.637.894.000,00 dengan persentase sebesar 100,00%, begitu juga dengan tahun 2012, anggaran dan realisasinya seimbang yaitu sebesar Rp 349.375.894.000,00 dengan persentase sebesar 100,00%. Dana alokasi khusus juga demikian, untuk tahun 2011 anggaran dan realisasinya seimbang yaitu sebesar Rp 45.286.200.000,00 dengan persentase sebesar 100,00%, tahun 2012 juga demikian, anggaran dan realisasinya seimbang sebesar Rp 54.114.180.000,00 dengan persentase sebesar 100,00%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik pada Orde Baru telah membawa pengaruh pada matinya kreativitas dan responsivitas daerah serta tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat demikian dominan terhadap daerah-daerah. Di Indonesia bentuk dana transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK selain Bagi Hasil. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi suatu daerah. selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan vertikal antara Pusat dan Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar Daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian Daerah.

Dominasi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah menyangkut dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud membuat terjadinya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Tetapi dengan adanya dana transfer dari Pemerintah Pusat pun tidak menjamin tercukupinya kebutuhan-kebutuhan di daerah tersebut. Dapat dilihat dalam tabel hasil penelitian di atas, bahwa hanya pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang anggaran dan realisasinya sama besar. Ini berarti bahwa dana transfer yang didapatkan dari pusat dapat mencukupi kebutuhan DAK dan DAU yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun di jenis dana perimbangan lain, anggaran yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan realisasi yang terjadi tiap tahunnya. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran pendapatan akan terkait dengan instansi pemerintahan daerah yang melaksanakannya. Pengaruh dana

transfer dari Pusat ke Daerah sangat membantu Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Pembahasan

Peranan Dana Transfer terhadap Belanja Modal

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersumber dari pelaksanaan desentralisasi. Belanja modal didefinisikan sebagai belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dan belanja modal sangat erat. Dalam jangka panjang, dana transfer sangat berperan terhadap belanja modal karena jika jumlah transfer dari pemerintah pusat dikurangi maka menyebabkan juga penurunan belanja modal. Kemandirian daerah juga tidak akan menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi.

Peranan PAD terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari iuran langsung masyarakat berupa pajak, retribusi, dan sebagainya. Belanja modal pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan kegiatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) terhadap pembangunan dengan adanya peningkatan PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Semakin banyak Pendapatan Asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah daerah, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri.

Peranan PAD terhadap Dana Transfer

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan memungkinkan pemerintah pusat untuk mengurangi dana transfer terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini, dana transfer sangat berperan pada setiap kegiatan yang dilakukan suatu daerah terutama dalam hal pendanaan. Cara ini dilakukan karena tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pusat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah: Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berperan penting terhadap aktifitas keuangan di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun efektifitas penggunaan dana transfer terhadap belanja modal masih kurang efektif akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi tidak merata. Sedangkan untuk peranan PAD terhadap belanja modal sangat diharapkan untuk menunjang kegiatan infrastruktur karena infrastruktur yang semakin meningkat akan menambah penghasilan daerah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah akan disesuaikan dengan pendapatan pemerintah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Saran

Karena kecilnya Pendapatan Asli Daerah maka masih sangat dibutuhkan peran pemerintah pusat untuk menopang perekonomian pemerintah daerah. Ketika terjadi penambahan transfer pemerintah pusat akan terjadi peningkatan belanja modal pemerintah daerah, demikian sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Badrudin Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Chalid Pheni. 2005. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*. Penerbit Kemitraan, Jakarta.
- Halim Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Horngren, Harison. 2007. *Pengertian-Definisi Akuntansi Menurut Para Ahli*. <http://mbegedut.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-akuntansi-menurut.html>. Diakses 20 November 2013. Hal. 4.
- Kaho Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Manan, Bagir. 2011. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Desentralisasi. <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/hubungan-antara-pusat-dan-daerah.html>. Diakses 15 November 2013. Hal. 8-9
- Mardiasmo dan Halim, Abdul. 1999. *Prinsip-prinsip dalam Manajemen Pembiayaan Desentralisasi*. MEP dan KKD FE-UGM, Yogyakarta.
- Nordiawan, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/533/jbptunikompp-gdl-nofridasil-26647-2-babii.pdf>
- Nurcholis. 2007. *Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*. <http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>. Hal. 182.
- Pandegirot. 2010. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.
- Simanjuntak. 2005. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dalam pasang surut otonomi Daerah*. Penerbit Tifa, Jakarta.
- Suaidah. 2011. Efektifitas Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam Belanja Daerah Kab/Kota Bangkalan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkatalog.library.perbanas.ac.id%2Fdownload_6119_RANGKUMAN%2520SKRIPSI_SITI%2520S_2007310426_2011.pdf&ei=O09PU77gBoXg8AW5zYGgCQ&usg=AFQjCNGFmGOJWxw47NREd5TKHR4VNmSTRQ&bvm=bv.64764171,d.dGc
- Waren. 2008. Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli. <http://agungnugroho01.blogspot.com/2013/02/pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli.html>. Diakses 10 Desember 2013. Hal. 10.